

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kasus Jugun Ianfu yang mengorbankan wanita asal Korea Selatan dan dilakukan oleh pihak Jepang adalah sebuah peristiwa yang berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, mulai dari Perang Dunia I hingga akhir Perang Dunia II. Pemerintah Jepang saat itu menganggap tindakan ini sebagai sesuatu yang biasa, dengan tujuan untuk meningkatkan semangat dan kondisi biologis tentara Jepang. Dalam kasus ini, lebih dari 200.000 wanita terlibat dan dipaksa menjadi wanita panggilan yang dikenal sebagai Jugun Ianfu. Mereka yang berhasil melarikan diri mengalami luka fisik dan trauma psikologis. Para korban juga merasa takut untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Berakhirnya Perang Dunia II membuka jalan bagi para perempuan ini untuk mulai bersuara dan menuntut hak-hak mereka, terutama di Korea Selatan. Isu mengenai perlakuan terhadap wanita dan budaya pun mulai mendapatkan perhatian khusus. Para korban kejahatan Jepang secara bertahap mulai menyuarakan hak-hak mereka kepada pemerintah Korea Selatan. Jepang, dalam upaya menjalin hubungan baik dengan Korea Selatan, berusaha untuk mempertanggungjawabkan perbuatan masa lalu mereka. Salah satu langkah yang diambil adalah permintaan maaf langsung yang datang dari Tomiichi Murayama, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang. Namun, permintaan maaf ini tidak sepenuhnya diterima dengan baik oleh pemerintah Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan menuntut Jepang untuk

meminta maaf kepada semua korban dan memberikan kompensasi finansial sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hak-hak yang telah dirampas.

Jepang dalam Upaya diplomasinya untuk menyelesaikan masalah *comfort Women* telah melakukan usaha berupa Perjanjian *The Basic Treaty* tahun 1965, *Kono Statement*, Pembentukan Asian Women's Fund, dan *Perjanjian Japan - South Korea Agreement on Comfort Women* tahun 2015. Upaya ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah *comfort Women* demi memperbaiki citra Jepang dimata dunia.

Dalam usahanya untuk melakukan diplomasi dalam menyelesaikan masalah *Comfort Women*, Jepang telah mencoba berbagai pendekatan. Namun, dalam upaya tersebut, ada beberapa kendala yang mereka hadapi. Salah satu kendala utama adalah respon negatif terhadap *Japan-South Korea Agreement on Comfort Women* yang dinilai sebagai perjanjian yang dibuat oleh Jepang sepihak tanpa melibatkan para korban. Selain itu, ada juga masalah ketidakpuasan yang berasal dari mantan *Jugun Ianfu* di Korea Selatan. Mereka telah mengambil tindakan untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah Jepang dan masyarakat internasional agar tuntutan mereka dapat dipenuhi. Tindakan ini termasuk melakukan demonstrasi di depan kantor kedutaan Jepang di Seoul dan pembuatan patung Pyeonghwa-bi.

Upaya diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan terkait isu *Comfort Women* dapat dianggap belum berhasil, bahkan cenderung mengalami kegagalan atau reaksi negatif. Ini terlihat dari kenyataan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang belum mendapatkan penerimaan yang positif baik dari

masyarakat Korea Selatan maupun pemerintahnya. Sebagai contoh, upaya seperti penandatanganan *The Basic Treaty* pada tahun 1965, *Kono Statement*, pembentukan *Asian Women's Fund*, dan perjanjian *Japan-ROK Agreement on Comfort Women* pada tahun 2015 tidak mampu menyelesaikan isu ini dengan baik. Dampaknya, hubungan antara kedua negara terganggu, terutama dengan munculnya perang dagang antara Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2019, penarikan Korea Selatan dari perjanjian GSOMIA, serta boikot produk-produk Jepang yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan. (MUFIDAH, 2021). Demikian upaya diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan masih jauh dari kata berhasil dan perlu adanya tindakan lebih dari Jepang untuk menyelesaikan isu tersebut.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Teoritis**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Kebijakan Jepang dalam menandatangani *Japan-South Korea Comfort Women Agreement* tahun 2015 ini merupakan penelitian yang masih jauh dari kesempurnaan, dan penulis mengesankan adanya penelitian lanjutan yang dapat menelanjuti isu yang telah dibahas oleh penulis. Terdapat masih banyak aspek yang menyeret minat untuk diteliti, namun belum terlibat dalam penelitian ini. Sebagai contoh, bagaimana Geun-Hye Park, yang menjadi presiden perempuan Korea Selatan, menghadapi isu ini, atau bagaimana nasionalisme Jepang yang mengalami kontras dengan pandangan Shinzo Abe yang memilih untuk menangani isu *Comfort Women* secara langsung. Selanjutnya, penulis mengesankan bagi penelitian yang telah menyukai

isu *Comfort Women* untuk meneliti aspek-aspek lain yang masih terkait dengan isu ini.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Isu kemanusiaan adalah salah satu perhatian utama dalam masyarakat saat ini, di mana setiap negara berusaha menjaga hak asasi warganya demi mempertahankan reputasi di mata masyarakat internasional. Selain masalah reputasi, tak dapat disangkal bahwa isu kemanusiaan harus diperhatikan sebagai contoh untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Isu *Comfort Women* adalah salah satu masalah yang berakar dari Perang Dunia II dan masih berlanjut hingga saat ini. Penyelesaian yang diberikan oleh Jepang dinilai tidak memadai, sehingga korban *Comfort Women* merasa tidak mendapatkan kompensasi yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis merekomendasikan perlunya tanggung jawab moral bagi pelaku kejahatan hak asasi manusia. Trauma yang dialami oleh korban *Comfort Women* telah menghantui mereka selama bertahun-tahun, dan Jepang sebagai mantan penjajah Korea yang mempekerjakan *Comfort Women* secara paksa harus bertanggung jawab penuh terhadap para korban.